

**KONTRIBUSI MAHASISWA DAERAH DALAM PENANGANAN INTOLERANSI
MELALUI SINERGI PERGURUAN TINGGI DI DIY**

Muhammad Salisul Khakim, Anike Febriyani Nugraha, Sukanti, Aliefah Rachma Sarwedi
Universitas 'Aisyiyah Yogyakarta
muhammad.salis@unisayogya.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk membangun mahasiswa daerah dalam organisasi internal kampus dengan bersinergi antara mahasiswa dalam IKPMDI (Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia) dan perguruan tinggi di DIY (Daerah Istimewa Yogyakarta). Upaya ini dilakukan untuk melindungi hak asasi mahasiswa daerah, serta meredam potensi kasus intoleransi yang berlatarbelakang kedaerahan. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif, dengan sumber data primer dan sekunder. Sumber primer dilakukan dengan pengamatan langsung, sedangkan data sekunder dalam dilakukan dengan studi pada jurnal, buku, media berita, dan dokumentasi lainnya mengenai teori, konsep serta contoh kasus permasalahan yang berkaitan dengan kebijakan toleransi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa IKPMDI telah berperan penting selama ini dalam menjaga solidaritas antar mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia di bawah Dinas Kebudayaan DIY. Hal ini akan lebih efektif perannya apabila dapat bersinergi dengan perguruan tinggi di DIY, karena status mahasiswa tersebut melekat pada perguruan tinggi, sehingga kinerja sebagai agent of tolerance lebih meningkatkan produktivitas mahasiswa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan.

Kata kunci : integritas, IKPMDI, perguruan tinggi, sinergi, toleransi

**CONTRIBUTION OF LOCAL STUDENT
IN HANDLING INTOLERANCE BY COLLAGE SYNERGY IN DIY**

ABSTRACT

This study aims to build local students in organizations by synergizing between students in Indonesian Local Student Association (IKPMDI) and collage in Yogyakarta Special Region (DIY). This effort was carried out to protect the rights of local students, as well as to reduce the potential for cases of intolerance with regional backgrounds. This research uses a qualitative approach, with primary and secondary data sources. Primary sources are done by direct observation, while secondary data in is done by studies in journals, books, news media, and other documentation about theories, concepts and examples of problem cases related to tolerance policy. The results of this study indicate that IKPMDI has played an important role so far in maintaining solidarity between students from various regions in Indonesia under the Culture Office. This role will be more effective if it can synergize with universities in DIY, because the status of the student is in the collage, so that performance as an agent of tolerance increases student productivity in education and culture.

Keywords: integrity, IKPMDI, collage, synergy, tolerance

PENDAHULUAN

Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis potensi peran mahasiswa daerah yang tergabung dalam Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) dalam menangani kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY). Mahasiswa dari berbagai daerah memiliki potensi dalam membangun sinergi dengan pemerintah maupun perguruan tinggi yang ada di DIY. Penelitian ini berupaya menemukan solusi yang efektif bagi mahasiswa, sebagai jalan keluar berbagai kasus intoleransi antar mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia yang ada di DIY, yang mengancam nilai hukum dan demokratisasi bangsa Indonesia.

Organisasi IKPMDI Indonesia Yogyakarta merupakan organisasi yang berbasis kedaerahan atau organisasi etnis yang berkedudukan di Daerah Istimewa Yogyakarta dan didirikan di Yogyakarta pada tanggal 8 Februari 2004. Pasal 11 pada Anggaran Dasar IKPMDI ini menjelaskan bahwa organisasi ini berfungsi sebagai wadah komunikasi bagi pelajar dan mahasiswa daerah dari seluruh Indonesia yang berada di Yogyakarta. Dengan demikian, mahasiswa dari berbagai penjuru Indonesia dari Sabang hingga Merauke yang berada di Yogyakarta memiliki perwakilan untuk menjadi pengurus dalam organisasi tersebut. Terbentuknya organisasi tersebut merupakan bentuk upaya pembangunan toleransi dari mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia, serta membangun semangat serta kesadaran saling menghormati satu sama lain kepada seluruh mahasiswa yang berada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi tujuan populer bagi masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia. Data dari Badan Pusat Statistik tahun 2014 menunjukkan rata-rata pendatang yang menetap di Kota Yogyakarta dengan tujuan melanjutkan studi sebagai pelajar atau mahasiswa cukup mendominasi dengan total 42.629 jiwa. Sementara itu, pada 2018 jumlah mahasiswa di Perguruan Tinggi Swasta (PTS) lebih dari 220.000 jiwa, jika digabungkan dengan yang ada di Perguruan Tinggi Negeri (PTN) jumlahnya melebihi angka

350.000 jiwa (Hardiyanto, 2018, 1). Hal tersebut menunjukkan bahwa DIY merupakan salah satu bagian kecil Indonesia yang penuh dengan kemajemukan dan keberagaman. Sebab, hampir setiap suku, ras, agama, bahkan golongan tertentu dapat ditemui di kota tersebut.

Kondisi kebudayaan yang kompleks dan majemuk di DIY dapat menimbulkan dampak positif sekaligus negatif yang tidak dapat dihindari. Hal ini berdampak positif apabila kemajemukan dan multikultural yang ada dapat dikelola dengan baik oleh pemerintah setempat, namun menjadi negatif apabila terdapat ketidaksielarasan baik pendapat maupun perilaku sehingga menimbulkan perselisihan antara keberagaman yang ada.

Kasus intoleransi tersebut seperti timbulnya berbagai tindakan diskriminasi hingga kriminal terhadap golongan tertentu karena permasalahan perbedaan kedaerahan. Pada September 2018 pernah terjadi pertikaian antara kelompok mahasiswa dari Ambon dan Papua yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat sekitar (Marzuki, 2018, 1). Tercatat sejak 2010 hingga 2018 telah terjadi tindakan intoleransi, mulai dari teror, intimidasi, pengeroyokan, penikaman hingga pembacokan yang menimpa mahasiswa Papua yang ada kemudian berdampak pada aksi Mahasiswa Papua dengan membentangkan spanduk "Yogyakarta Tidak Nyaman untuk Mahasiswa Papua" (Hardiyanto, 2018, 1). Sementara itu, Hasil penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat Setara Institute menyimpulkan DIY adalah 10 besar provinsi dengan jumlah kasus kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi di Indonesia (Galih, 2019, 1).

Menindaklanjuti berbagai kasus negatif yang muncul atas nama keberagaman budaya, ras, suku, agama, dan golongan, aksi toleransi dan demokrasi di atas, maka setiap elemen negara perlu melakukan evaluasi dan langkah yang strategis. Mahasiswa sebagai komponen aktif adalah kelompok yang tepat untuk dijadikan ujung tombak dalam menyelesaikan kasus diskriminatif dan intoleransi yang

bertentangan dengan hukum dan demokrasi di negara ini.

Perkembangan masyarakat Yogyakarta pada saat ini banyak mengalami perubahan sosial yang terpengaruh karena banyak faktor kedaerahan yang muncul pada para aktivis kemahasiswaan. Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia menjadi salah satunya organisasi yang menunjukkan secara jelas bahwa mahasiswa memiliki optimisme yang kuat dalam membangun solidaritas dan nasionalisme kebangsaan. Organisasi kedaerahan tersebut dapat membentuk suatu karakter para anggota, khususnya dalam membangun integritas dari ikatan tersebut agar dapat bersinergi membentuk sebuah solusi perdamaian yang menjunjung asas keadilan dan toleransi yang tinggi. Keberadaan IKPMDI menjadi alternatif yang strategis bagi pemerintah dalam menangani berbagai kasus intoleransi dan diskriminasi di Yogyakarta.

Latar belakang permasalahan ini menunjukkan bahwa mahasiswa daerah memiliki peluang dan ancaman yang saling berkaitan satu sama lain. Perkumpulan mahasiswa daerah perlu diakomodasi dengan baik oleh Pemerintah DIY maupun perguruan tinggi yang bersangkutan. Aliansi kemahasiswaan dari berbagai daerah di Indonesia menjadi media untuk saling menjaga rasa kedaerahan dan rasa nasionalisme, yang dapat diintegrasikan dengan perguruan tinggi.

Berdasarkan dari latar belakang di atas, maka dapat dilihat bahwa rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana cara mengoptimalkan integritas IKPMDI melalui sinergi dengan perguruan tinggi dalam menangani kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta? Jadi, dalam penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi peran optimal mahasiswa daerah dalam IKPMDI yang bersinergi dengan perguruan tinggi untuk menangani kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Penelitian ini diharapkan mampu bermanfaat secara khusus bagi pemerintah sebagai solusi dalam menjaga kerukunan yang efektif dalam menghadapi berbagai permasalahan di kalangan mahasiswa

daerah. Selain itu, secara umum penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk mahasiswa agar dapat saling menghormati dan menghargai satu dengan yang lainnya walaupun memiliki ras, suku, budaya, dan adat istiadat yang berbeda dalam menjalani kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif, yang berupaya untuk memecahkan permasalahan yang sedang terjadi dengan menggambarkan kondisi mahasiswa dari berbagai daerah yang memiliki peluang untuk bersinergi dengan perguruan tinggi dalam menangani masalah intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti dalam hal ini dilakukan dengan berdasarkan pada sumber data primer dan sekunder, yang dikumpulkan secara langsung dan tidak langsung mengenai situasi dan kondisi toleransi yang berkaitan dengan sinergi antara mahasiswa daerah dengan kebijakan perguruan tinggi.

HASIL PENELITIAN/KAJIAN

Data pada latar belakang di atas menunjukkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi episentrum persebaran penduduk sebagai mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Hal menunjukkan bahwa wilayah ini menjadi tempat yang sangat majemuk, karena menjadi pertemuan antar penduduk/mahasiswa yang berlatar belakang kedaerahan yang multikultural. Kedatangan para penduduk baru dari luar wilayah ini tentu membawa budaya baru yang berbeda dan memerlukan adaptasi baik dengan para pendatang dari daerah yang lain maupun masyarakat asli DIY. Hasil penelitian disini akan menjelaskan proses terjadinya intoleransi karena faktor politik identitas kedaerahan, kebijakan perguruan tinggi, peran mahasiswa daerah, hingga sinergi

pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus intoleransi di daerah yang mejemuk ini.

Intoleransi dari Politik Identitas Kedaerahan

Selama proses adaptasi berlangsung, masyarakat mengalami berbagai macam fenomena, baik asimilasi hingga akulturasi, baik itu bersifat positif maupun negatif menurut masing-masing daerah. Di antaranya timbul konflik antar daerah yang mengatasnamakan kedaerahan dan ketidakadilan yang memicu perbuatan intoleransi dan diskriminasi terhadap golongan tertentu. Sehingga di tengah keberagaman ras, suku, budaya, dan adat istiadat tentunya terdapat rasa toleransi yang harus dijunjung tinggi. Perselisihan cara pandang yang terjadi antar ras, suku, agama, dan golongan tertentu merupakan contoh kecil bahwa masyarakat Indonesia belum seutuhnya memahami toleransi yang harusnya diterapkan sebagai aktualisasi Pancasila ideologi negara Indonesia. Toleransi itu sendiri menurut Borba (2008: 232) merupakan sikap saling menghargai tanpa membedakan suku, gender, penampilan, budaya, keyakinan, kemampuan, atau orientasi seksual.

Percampuran dua bahkan lebih perbedaan sifat kedaerahan didorong atas kemudahan sarana dan prasarana dalam dunia modern saat ini. Proses terjadi mulai pada tahap interlokal hingga internasional, sehingga menjadi global. Dalam hal ini, artinya ada daerah yang mempengaruhi dan yang terpengaruh, baik itu bersifat positif maupun negatif terhadap entitas tertentu. Buchari (2014, 21) menjelaskan bahwa permasalahan ketika globalisasi masuk ke dalam politik identitas adalah ketika politik identitas didasarkan pada pencarian perbedaan. Kehadiran politik identitas menciptakan tekanan-tekanan dari pihak yang ingin mendominasi, sehingga dapat memperlemah identifikasi individu sebagai anggota dari suatu bangsa.

Politisasi kedaerahan yang terjadi telah berupaya mempengaruhi dan mendominasi dari sifat kedaerahan pihak minoritas. Kedua belah pihak saling mempertahankan

eksistensinya dalam kehidupan bermasyarakat maupun bernegara, sehingga menimbulkan perbenturan maupun peleburan sifat kedaerahan yang telah dibawa oleh masyarakat berbagai daerah di atas.

Berdasarkan kajian teori di atas, dikaitkan dengan kasus yang menjadi fokus penelitian ini adalah tindakan intoleran di kalangan mahasiswa daerah semakin sering terjadi. Bahkan pada tahun 2018 lalu penelitian Lembaga Swadaya Masyarakat yang fokus mengadvokasi demokrasi, kebebasan politik, dan hak asasi manusia Setara Institute menyimpulkan bahwa Daerah Istimewa Yogyakarta tergolong daerah dengan jumlah kasus kebebasan beragama/berkeyakinan tertinggi di Indonesia.

Kasus intoleran tersebut seperti yang telah dijelaskan pada latar belakang penelitian ini, seperti sejak 2010 hingga 2018 telah terjadi tindakan intoleran, mulai dari teror, intimidasi, pengeroyokan, penikaman hingga pembacokan yang menimpa mahasiswa Papua yang ada kemudian berdampak pada aksi mahasiswa daerah, hingga pertikaian antara kelompok mahasiswa dari Ambon dan Papua yang menyebabkan kekhawatiran masyarakat sekitar pada September 2018 di Sleman.

Deretan tindakan diskriminatif hingga kriminal di atas menunjukkan bahwa masih tingginya perselisihan yang berujung menjadi kasus intoleran terhadap golongan kedaerahan tertentu, khususnya bagi para penduduk pendatang dalam jumlah besar, yaitu para mahasiswa dari berbagai daerah. Yeimo, Ketua Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Papua dalam Artharini (2016, 1) mengungkapkan bahwa sejumlah mahasiswa Papua yang tinggal di asrama merasa khawatir dengan keamanan, yaitu setelah polisi menutup akses ke asrama dan menangkap setidaknya tujuh mahasiswa di beberapa tempat. Aktivitas para mahasiswa Papua pun juga menjadi was-was, terdapat bahasa-bahasa berkonotasi negatif yang dikeluarkan seperti “monyet, anjing, pulang ke Papua”, yang seakan-akan bahasa itu masih benci kepada mahasiswa Papua.

Salah satu peristiwa intoleransi terhadap mahasiswa daerah Papua di atas menunjukkan bahwa golongan minoritas mahasiswa asal daerah perlu mendapatkan penanganan oleh pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta, termasuk oleh perguruan tinggi negeri maupun swasta di wilayah tersebut. Stereotip dan stigma negatif perlu dibangun oleh pihak tersebut melalui kebijakan yang sinergis antar peranan mahasiswa daerah itu sendiri.

Kebijakan Perguruan Tinggi dalam Kkepentingan Pendidikan dan Kebudayaan

Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah seharusnya dapat berfungsi efektif dalam mengatur tata kehidupan berdasarkan nilai-nilai budaya, etika, serta tata krama dalam bermasyarakat yang sangat majemuk, seperti di Daerah Istimewa Yogyakarta. Undang-Undang Dasar 1945 pasal 28E ayat (2) yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan. Selain itu, dalam pasal 28I ayat (1) Diakui bahwa hak untuk beragama merupakan Hak Asasi Manusia, dan pasal 29 ayat (2) yang juga menyatakan bahwa Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduknya untuk memeluk agama.

Sementara itu, perguruan tinggi negeri maupun swasta sebagai wadah mahasiswa yang berasal dari berbagai daerah di Indonesia di Daerah Istimewa Yogyakarta juga memiliki peran penting dalam mengelola kebijakan dan organisasinya, agar tidak terjadi peristiwa intoleran atau diskriminasi. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 pasal 6 ayat 2 juga menjelaskan bahwa pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai agama, nilai budaya, kemajemukan, persatuan, dan kesatuan bangsa. Di perguruan tinggi juga diwajibkan mata kuliah Pendidikan Kewarganegaraan, yang merupakan materi teori dan praktik bagi mahasiswa sebagai warga negara Indonesia yang berproses dalam

kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.

Pendidikan Kewarganegaraan memiliki misi sebagai pendidikan karakter bertujuan membekali siswa sebagai warga negara muda yang cerdas (*to be smart and good citizen*), memiliki pengetahuan yang baik dan luas (*knowledge*), memiliki keterampilan yang baik dalam berbangsa dan bernegara (*skills*), memiliki sikap dan nilai yang baik (*attitudes and values*) yang bisa bermanfaat dalam pembentukan rasa kebanggaan terhadap negara dan cinta tanah air (Totok, 2018, 10). Hal ini menunjukkan bahwa tujuan dari penyelenggaraan mata kuliah ini memiliki peran penting dalam mendukung peran mahasiswa menjadi warga negara yang baik. Namun demikian, mahasiswa tetap harus memahami dan menghayati keberagaman daerah di negara ini. Artinya mahasiswa juga memerlukan pendidikan multikultural lebih dalam, agar dapat konsep kenegaraan lebih komprehensif dan universal.

Pendidikan multikultural haruslah mencakup hal yang berkaitan dengan toleransi, perbedaan etno-kultural dan agama, bahaya diskriminasi, penyelesaian konflik dan mediasi, HAM, demokrasi dan pluralitas, kemanusiaan universal, dan subjek-subjek lain yang relevan mengantarkan terbentuknya masyarakat madani yang cinta perdamaian serta menghargai perbedaan (Wardhani, 2018, 8). Konsep pendidikan ini tentu tidak selalu dalam konsep teoritis, pendidikan lintas budaya dapat bersifat praktis dalam upaya penghayatan setiap nilai toleransi antar budaya yang berbeda. Sementara itu, Lafraya (2011, 32) menjelaskan bahwa latar belakang yang berbeda memerlukan adanya pendidikan lintas budaya, yang meliputi pendidikan di nilai-nilai perdamaian, hak asasi manusia, interkulturalisme, menghormati perbedaan, yang menempatkan kelompok tertentu dalam model baru masyarakat dan umat manusia.

Kontribusi Mahasiswa Daerah dalam Membangun Budaya Kolektif

Peranan mahasiswa siswa sebagai pemuda memiliki potensi besar yang harus disalurkan pada media atau wadah tertentu, sehingga lebih produktif terhadap kegiatan-kegiatan sosial dan akademis, dan mengurangi potensi kegiatan diskriminatif, kriminal, dan tindakan intoleransi lainnya. Keberhasilan suatu kegiatan, menurut Berg (2009, 345) ditunjukkan dengan pemuda yang berpengalaman dalam bekerjasama dan bergabung dengan orang lain untuk mengadvokasi dan memperoleh dana dari pemerintah untuk kegiatan pemuda, serta melaksanakan kegiatan pemuda yang berbasis kemitraan dan pendidikan yang berbasis pada kepemimpinan pemuda.

Penanganan tindakan intoleran menjadi suatu kegiatan-kegiatan yang produktif bagi pemuda akan lebih efektif dengan berbasis pada kemitraan dan pendidikan. Sinergi dan kerjasama antara mahasiswa dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi akan berdampak positif bagi setiap pihak, kondisi yang dinamis pun akan dapat terjaga dengan baik. Kontribusi setiap pihak ini akan mendukung penanganan tindakan intoleran ini dengan baik, artinya kebijakan pemerintah daerah maupun perguruan tinggi akan menentukan sikap mahasiswa dalam mengambil suatu tindakan.

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Daerah tentu juga memiliki peran dalam penanganan dan pencegahan kasus intoleran. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan tidak hanya berkaitan dengan pelestarian kebudayaan lokal, akan tetapi juga terkait dengan akulturasi budaya dari berbagai daerah yang ada di Indonesia.

Salah satu kegiatan tersebut adalah Karnaval Budaya Selendang Sutera (Semarak Legenda Suku Nusantara). Ratusan pelajar dan mahasiswa dari seluruh daerah provinsi Indonesia yang tergabung dalam Ikatan Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) di Daerah Istimewa Yogyakarta mengikuti Karnaval Budaya tersebut. Tujuannya adalah

untuk menyatukan seluruh budaya dari banyaknya latar belakang pelajar dan mahasiswa yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, sebagai pesan kepada masyarakat bahwa pelajar dan mahasiswa dari luar daerah adalah suatu kesatuan, yang masing-masing memiliki budaya sendiri dan menjadi bentuk akulturasi (Prasetya, 2017, 1).

Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta telah melakukan kegiatan Kemah Budaya, yang diselenggarakan selama satu minggu di Desa Budaya Piyungan. Di tempat tersebut para mahasiswa menginap, dan memperoleh banyak materi pendidikan dan kebudayaan dari lintas daerah, yang disampaikan oleh para budayawan dan pakar. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya pemerintah telah berupaya untuk menggelar aksi dan mengadakan kegiatan kebudayaan di kalangan mahasiswa sebagai wujud kepedulian terhadap fenomena miris intoleransi di Yogyakarta, namun efektivitas kegiatan tersebut juga masih dipertanyakan karena kasus intoleransi masih saja terjadi.

Kejadian kasus intoleran tidak hanya menjadi tugas pemerintah untuk mencegah dan memutus persepsi yang keliru di kalangan masyarakat tentang stereotip perbedaan suku, agama, ras, dan golongan dari berbagai daerah. Pemerintah daerah dalam hal ini juga seharusnya dapat bersinergi secara efektif dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta, karena legalitas status mahasiswa terdapat pada institusi tersebut.

Berdasarkan kasus di atas maka diperlukan adaptasi baik dari mahasiswa ataupun pelajar daerah yang sedang menempuh pendidikan di Daerah Istimewa Yogyakarta, namun juga perlu ada adaptasi dari masyarakat asli maupun luar Yogyakarta dengan keberadaan mahasiswa dari berbagai daerah. Penanaman sikap toleransi tentu sangat diperlukan untuk mencegah terjadinya kasus yang sama terulang kembali.

Salah satu solusi yang efektif mengenai penanganan kasus tersebut adalah dengan menggunakan sarana dan prasarana yang

sudah ada kemudian dievaluasi, yaitu melalui sinergi antara organisasi etnis kedaerahan dengan lembaga pendidikan tinggi negeri maupun swasta yang ada, dan tentu dengan pembinaan dan pendampingan oleh Dinas Kebudayaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Solusi tersebut dapat dijadikan sebagai alternatif pembaharuan dan merupakan tindakan preventif dalam mengatasi kasus intoleransi. Dalam hal ini organisasi yang dimaksud adalah Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) yang akan bertindak sebagai *agent of tolerance*. Organisasi kedaerahan ini akan efektif sebagai *agent* tersebut, karena sudah bergerak sejak tahun 2004 di Daerah Istimewa Yogyakarta, dan Dinas Kebudayaan juga menjadi bagian dari mitranya, akan tetapi masih belum dapat bersinergi dengan perguruan tinggi.

Kontribusi para mahasiswa daerah sebagai *agent of tolerance* di daerah yang sangat multikultural di Daerah Istimewa Yogyakarta tentu akan berdampak positif terhadap mahasiswa itu sendiri, yang pada akhirnya akan lebih produktif dalam bidang sosial dan akademik. Agen ini tentu harus dapat diintegrasikan dengan pemerintah daerah dan perguruan tinggi seperti yang dijelaskan di atas, sehingga arah pergerakan IKPMDI yang menjadi agen tersebut dapat berjalan efektif dalam penanganan kasus intoleransi dan meningkatkan produktifitas akademik mahasiswa daerah.

Bentuk dari agen di atas tentu dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing mahasiswa, perguruan tinggi, maupun pemerintah daerah, yang terpenting adalah terjaganya sinergi masing-masing pihak yang berkepentingan dalam mewujudkan tujuan bersama. Khakim dkk (2017, 27) menjelaskan bahwa *agent of tolerance* adalah forum diskusi rutin antar mahasiswa yang mengkritisi kebijakan Perguruan Tinggi dan lingkungan sekitarnya, serta menampung saran-saran dari para mahasiswa yang peduli terhadap sikap saling menghormati dan menghargai perbedaan dalam lingkungan Perguruan Tinggi. Mahasiswa yang tergabung dalam *agent of*

tolerance ini, dalam pelaksanaan kajiannya tidak bersifat individual, melainkan juga dapat melakukan pendekatan bersama dengan dosen Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, dosen Agama, serta Biro Kemahasiswaan Perguruan Tinggi.

Penjelasan bentuk pergerakan mahasiswa daerah dapat disalurkan menjadi bahan kajian dan kebijakan yang efektif dalam perguruan tinggi. Mahasiswa akan menjadi lebih demokratis dan kritis dengan dasar edukasi akulturasi yang produktif, sehingga dapat menekan potensi terjadinya kasus intoleransi dan meningkatkan aktivitas prestasi akademik mahasiswa di perguruan tinggi.

Dalam mempersiapkan wadah atau organisasi tersebut agar berada di bawah perguruan tinggi dan bersinergi juga dengan pemerintah daerah, tentu dibutuhkan payung hukum, agar Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) tersebut dapat menjadi organisasi kemahasiswaan yang legal dan akuntabel dalam implementasinya. Dengan demikian, pemerintah dalam hal ini juga perlu memiliki kebijakan untuk mendukung langkah strategis dalam upaya membangun sinergi, dan dapat berjalan dengan berkelanjutan.

Sinergi Mahasiswa Daerah dan Perguruan Tinggi dalam Penanganan Intoleransi

Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia telah mengeluarkan Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti) Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Kebijakan yang berkaitan dengan organisasi kemahasiswaan tersebut sebelumnya juga sempat mendapatkan kritik dari beberapa kalangan pada saat pembahasan rancangan peraturan, karena dinilai dapat mengancam kebebasan berorganisasi dan gerakan kritis mahasiswa. Akan tetapi, kemudian peraturan ini dapat diperbaiki dan lebih fokus pada pembinaan ideologi Pancasila

dalam pergerakan mahasiswa di perguruan tinggi.

Pasal 3 pada peraturan ini menjelaskan bahwa Perguruan tinggi dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila. Organisasi kemahasiswaan ini bertanggung jawab kepada pemimpin perguruan tinggi. Kegiatan kemahasiswaan dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Akan tetapi, dalam peraturan ini melarang organisasi kemahasiswaan tersebut melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi.

Kebijakan pemerintah pada akhir 2018 lalu tersebut dapat dikatakan sejalan dengan tujuan penelitian ini, yaitu berupaya untuk membangun sinergi antar organisasi internal maupun eksternal perguruan tinggi dalam mengamalkan nilai-nilai Pancasila. Dengan kata lain, peraturan ini dapat dijadikan sebagai acuan payung hukum dibangunnya sinergi antara Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) dengan perguruan tinggi negeri maupun swasta yang ada di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Proses transformasi organisasi eksternal menjadi internal ini tentu membutuhkan pendekatan bersama antar kedua belah pihak, agar tidak saling mengganggu kepentingan satu sama lain, melainkan justru yang terbangun adalah etos kerja sama dalam membangun akulturasi budaya dan pendidikan yang produktif. Dengan demikian, perlu adanya tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk membangun pola sinergi antara mahasiswa yang berasal dari dalam maupun dari luar IKPMDI dengan perguruan tinggi.

Tahapan awal yang perlu dibangun disini adalah proses akulturasi budaya dan pendidikan yang produktif, sehingga perlu menghindari terjadinya proses polarisasi atau pengkutupan organisasi kedaerahan, yang dapat mengakibatkan munculnya etnosentrisme. Paham ini adalah penilaian

terhadap kebudayaan lain atas dasar nilai dan standar budaya sendiri, sehingga memandang kelompok lain relatif lebih rendah dari pada dirinya, yang mengakibatkan tindakan-tindakan intoleran atas dasar kedaerahan.

Kolaborasi antar kelompok menjadi penting untuk dapat dimediasi oleh perguruan tinggi dalam melakukan pembinaan ideologi Pancasila melalui pergerakan-pergerakan kemahasiswaan. Hogg (2012, 238) dalam penelitiannya yang berjudul *Intergroup Leadership in Organizations: Leading Across Group and Organizational Boundaries*, berpendapat bahwa kolaborasi antarkelompok adalah arena untuk bentrok identitas kelompok, agar menjadi efektif, maka kepemimpinan antarkelompok harus terlibat dengan masalah identitas kelompok. Pembangun identitas kolektif yang menyeluruh, maka diperlukan kepemimpinan antarkelompok yang efektif juga, yaitu perlu kembali ke akar analisis konseptual hubungan antarkelompok dan mempertimbangkan kembali bentuk-bentuk identitas sosial yang dapat diambil.

Mahasiswa daerah dapat membangun organisasi kedaerahan terlebih dahulu sebelum bergabung dalam dalam satu wadah utama yang lebih pada IKPMDI. Setiap organisasi kedaerahan dapat disebut sebagai Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah (IKPMD) yang dipimpin oleh ketua yang dianggap mampu mewakili kepentingan daerahnya. Kemudian, setiap pemimpin yang ada dalam IKPMD dapat bergabung dalam IKPMDI dengan motivasi membangun identitas kolektif yang produktif.

Kepemimpinan antar kelompok kedaerahan di atas akan meminimalisir terjadinya polarisasi etnosentrisme, dan mengurangi potensi gesekan-gesekan yang mengakibatkan terjadinya tindakan intoleran dengan latar belakang kedaerahan. Sinergi antar mahasiswa daerah ini sendiri dapat membangun perspektif pada generasi pemuda dalam bekerjasama dalam mewujudkan kepentingan bersama.

Perspektif pengembangan pemuda yang positif dapat mendukung hubungan

dengan beberapa mitra dalam masyarakat, serta memberikan dasar bagi upaya bersama dan kolaborasi menuju tujuan bersama (Allison, 2011, 8). Persepsi positif yang telah dibangun bersama ini dapat berdampak pada keterbukaan masing-masing pihak yang saling berkepentingan, termasuk juga antar berbagai kelompok kedaerahan yang akan dibangun.

Prototipe atau model yang menjadi percontohan terkait kontribusi mahasiswa daerah dalam penanganan intoleransi melalui sinergi IKPMDI dan perguruan tinggi ini, dapat dimulai dengan bersinergi melalui perguruan tinggi negeri. Pertimbangannya adalah karena lembaga pendidikan ini merupakan institusi milik negara, sehingga banyak fasilitas sarana dan prasarana yang disubsidi oleh negara, serta jumlah mahasiswanya pun jauh lebih besar dibandingkan dengan perguruan tinggi swasta. Model ini tentu akan dimonitoring dan dievaluasi secara berkelanjutan dengan menimbang efektifitas organisasi dalam meningkatkan produktivitas sosial dan akademik mahasiswa, serta dapat menurunkan potensi terjadinya kasus intoleransi di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pergerakan mahasiswa daerah melalui IKPMDI di bawah Biro Kemahasiswaan Perguruan Tinggi Negeri dapat dimulai dengan menyusun Anggaran Dasar Rumah Tangga organisasi, sebagai acuan agar sinergi dengan Permenristekdikti Nomor 55 Tahun 2018, yaitu agar berfungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila, dan tidak melakukan kegiatan politik praktis di perguruan tinggi. Mahasiswa daerah dalam hal ini menjadi *agent of tolerance* dengan melakukan kegiatan diskusi rutin antar mahasiswa yang mengkritisi perkembangan demokrasi yang saling menghormati dan menghargai perbedaan. Kajian-kajian yang dibangun dapat bersifat saling membangun kepentingan mahasiswa dari berbagai daerah, dengan meningkatkan produktivitas prestasi akademik dan menurunkan potensi tindakan intoleran di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Kebebasan bagi mahasiswa daerah dalam berdemokrasi ini akan membuat

mahasiswa menjadi aktif dalam berpartisipasi menjalankan peran dan fungsinya sebagai generasi muda untuk membangun tujuan bangsa yang beranekaragam ini. Funk dan kawan-kawan (2012, 288) berpendapat bahwa pemuda mengalami peningkatan partisipasi karena memiliki kebebasan untuk menentukan mereka sendiri berdasarkan kemampuan dan kenyamanan mereka. Keterlibatan pemuda menciptakan sebuah kegiatan yang lebih relevan karena membawa realitas dan interpretasi pemuda dari temuan yang berdasarkan pada pengalaman, dan pemuda juga memiliki kesempatan untuk mempengaruhi sekitar komunitas mereka.

Keterwakilan komunitas daerah mereka dalam suatu kegiatan kolektif akan membuat mahasiswa daerah menjadi terlibat, karena dianggap relevan dan sejalan dengan kepentingan kebudayaan daerah mereka. Forum mahasiswa dari berbagai daerah ini akan menjadi identitas kolektif saling menguntungkan satu sama lain, terutama dalam menjaga harmonisasi keberagaman individual yang berpotensi pada gesekan-gesekan stereotip, yang mengakibatkan munculnya potensi tindakan-tindakan intoleran.

Organisasi kemahasiswaan IKPMDI yang telah legal menjadi organisasi internal kampus ini harus tetap berintegritas sebagai organisasi antar daerah yang menjunjung tinggi toleransi dengan berlandaskan ideologi Pancasila. Kegiatan yang dapat dilakukan oleh IKPMDI selain dalam forum diskusi di atas, organisasi ini dapat melaksanakan kegiatan seminar kebangsaan, festival kebudayaan, diskusi publik, serta pendidikan maupun pelatihan yang berhubungan dengan pembelajaran lintas budaya-budaya daerah.

Mahasiswa dari berbagai daerah di Indonesia perlu meningkatkan rasa empati dan saling menghormati setiap perbedaan yang ada sebagai bentuk kearifan lokal yang perlu dipertahankan. Mahasiswa tersebut juga jangan bersikap eksklusif, akan tetapi harus bersikap inklusif dan terbuka terhadap kehidupan yang majemuk, sehingga akan mendekati pada situasi yang lebih harmonis

dari pada situasi yang diskriminatif dan intoleran.

SIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas, maka dapat disimpulkan beberapa hal terkait dengan kontribusi mahasiswa daerah dalam penanganan intoleransi melalui sinergi perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Pertama, daerah yang mejemuk memiliki potensi yang tinggi terhadap terjadinya tindakan-tindakan intoleran, terutama karena faktor kedaerahan. Yogyakarta menjadi pusat pendidikan yang mendorong berkumpulnya mahasiswa dari berbagai daerah yang ada di Indonesia. Proses akulturasi yang bersifat negatif berdampak pada potensi tindakan-tindakan intoleran, mulai tindakan diskriminatif hingga tindakan kriminal karena faktor suku, agama, ras, dan golongan tertentu. Hasil dari proses percampuran budaya ini perlu dikelola dengan bijak, agar mahasiswa dari berbagai daerah yang setiap tahun berdatangan ke wilayah ini dapat produktif dalam bidang kebudayaan dan pendidikan yang berprestasi. Dengan demikian, dibutuhkan sinergi dari berbagai pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus intoleran ini.

Kedua, Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta melalui Dinas Kebudayaan Daerah memiliki peran penting dalam pembinaan masyarakat dari berbagai daerah di Indonesia, agar dapat melakukan proses akulturasi dengan baik. Karnaval Budaya Selendang Sutura dan Kemah Budaya menjadi upaya dalam memperkenalkan identitas kolektif kebangsaan di wilayah ini. Perkenalan dan pendidikan silang antar budaya dari berbagai daerah ini membuat antar mahasiswa memahami kondisi multikultural pada negeri ini, sehingga dapat meminimalisir setereotip mahasiswa daerah.

Ketiga, Pemerintah Pusat melalui Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi telah membuka peluang sinergi antar berbagai pihak yang berkepentingan dalam penanganan kasus intoleran, yaitu ketika

disahkannya Permenristekdik Nomor 55 Tahun 2018 tentang Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi. Perguruan tinggi dalam hal ini dapat membentuk organisasi kemahasiswaan yang secara khusus memiliki fungsi sebagai wadah pembinaan ideologi Pancasila, yaitu dengan kegiatan kemahasiswaan yang dapat melibatkan dan/atau bekerja sama dengan organisasi kemahasiswaan ekstra perguruan tinggi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kebijakan ini menunjukkan bahwa perguruan tinggi negeri maupun swasta memiliki peran penting dalam mengelola Mahasiswanya agar dapat produktif dan berprestasi dalam bidang sosial dan akademiknya.

Terakhir, Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Daerah Indonesia (IKPMDI) memiliki peluang yang strategis untuk bersinergi dengan setiap perguruan tinggi di Daerah Istimewa Yogyakarta. Organisasi eksternal kampus ini telah banyak berkontribusi dalam membangun akulturasi yang positif di wilayah yang majemuk ini. Peluang sinergi IKPMDI dengan perguruan tinggi tersebut dapat membuat mahasiswa dari berbagai daerah menjadi produktif dalam meminimalisir terjadinya tindakan-tindakan intoleran. Potensi minat dan bakat mahasiswa daerah dari berbagai wilayah di Indonesia dapat diarahkan untuk meningkatkan produktifitas mahasiswa dalam bidang pendidikan dan kebudayaan. Mahasiswa akan menjadi lebih kritis dan responsif terhadap dinamika perkembangan proses akulturasi, melalui kegiatan-kegiatan ilmiah diluar perkuliahan yang lebih praktis, sehingga akan lebih membuka wawasan kebangsaan mahasiswa.

DAFTAR PUSTAKA

- Allison, Kevin W. (2011). Connecting Youth Violence Prevention, Positive Youth Development, and Community Mobilization. *Community Psychol*, Volume 48, 8-20. doi: 10.1007/s10464-010-9407-9

- Arif, Hafidz. (2015). *Songsong Sumpah Pemuda, IKPMDI Yogyakarta Bacakan Pernyataan Sikap*. Dikpora DIY. Diakses pada 10 Oktober 2018 dari http://pendidikan-diy.go.id/dinas_v4/?view=vberita&id_suib=3984.
- Artharini, Isyana. 2016. *Mahasiswa Papua di Yogyakarta 'belum merasa aman*. Diakses pada 19 April 2020 dari https://www.bbc.com/indonesia/berita_indonesia/2016/07/160718_indonesia_papua_yogya
- Berg, Marlene. 2009. Youth Action Research for Prevention: A Multi-level Intervention Designed to Increase Efficacy and Empowerment Among Urban Youth. *Community Psychol*, Volume 43, 345–359. doi: 10.1007/s10464-009-9231-2
- Borba, M. 2008. *Membangun Kecerdasan Moral: Tujuh Kebajikan Utama Agar Anak Bermoral Tinggi*. Penerjemah: Lina Jusuf. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama.
- Badan Pusat Statistik. (2017). *Jumlah Perguruan Tinggi, Mahasiswa, dan Tenaga Edukatif (Negeri dan Swasta) di Bawah Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan Menurut Provinsi tahun ajaran 2013/2014-2014/2015*. Diakses pada 10 Oktober 2018 dari <https://www.bps.go.id/statistictable/2015/09/14/1839/jumlah-perguruan-tinggi-mahasiswa-dan-tenaga-edukatif-negeri-dan-swasta-di-bawah-kementrian-pendidikan-dan-kebudayaan-menurut-provinsi-2013-2014-2014-2015.html>.
- Buchari, S. A. (2014). *Kebangkitan Etnis Menuju Politik Identitas*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Budi Winarno. (2008). *Sistem Politik Indonesia Era Reformasi*. Yogyakarta: Media Pressindo.
- Funk, A., Van Borek, N., Taylor, D. et al. (2012). Climbing the Ladder of Participation: Engaging Experiential Youth in a Participatory Research Project. *Canadian Journal of Public Health*, 103(4), 288-292. doi: <https://doi.org/10.1007/BF03404237>
- Galih, Bayu. (2019). *Setara: Dalam 5 Tahun Terakhir Terjadi Peningkatan Intoleransi di Yogyakarta*. Diakses pada 19 April 2020 dari <https://nasional.kompas.com/read/2019/11/24/19300051/setara--dalam-5-tahun-terakhir-terjadi-peningkatan-intoleransi-di-yogyakarta>.
- Hardiyanto, Sari. (2018). *Predikat Jogja Sebagai Kota Pendidikan Dipertaruhkan*. Diakses pada 19 April 2020 dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/09/03/2018/predikat-jogja-sebagai-kota-pendidikan-dipertaruhkan/>.
- Hardiyanto, Sari. (2018). *Datangi Kantor Gubernur, Mahasiswa Papua Minta Premanisme Dihilangkan*. Diakses pada 19 April 2020 dari <https://www.jawapos.com/jpg-today/04/10/2018/datangi-kantor-gubernur-mahasiswa-papua-minta-premanisme-dihilangkan/>.
- Hogg, Michael A. (2012). Intergroup Leadership in Organizations: Leading Across Group and Organizational Boundaries. *Academy of Management*, 37 (2), 232-255. doi: <http://dx.doi.org/10.5465/amr.2010.0221>
- Khakim, Muhammad S., Nugraha, Anike F., Sukanti, dan Sarwedi, Aliefah Rachma. (2017). Mahasiswa Sebagai Agent Of Tolerance dalam Membangun Hukum Dan Kebijakan Beragama Di Perguruan Tinggi Islam DIY. *Jurnal Ilmiah Hukum*, 11(1), 16-30.
- Lafraya, Susana. (2011). *Intercultural learning in non-formal education: theoretical frameworks and starting points*. Paris: Council of Europe Publishing.
- Marzuki, Kastolani. (2018). 2 Kelompok Mahasiswa Papua dan Ambon Nyaris Bentrok di Sleman. Diakses pada 19 April 2020 dari <https://yogya.inews.id/berita/2-kelompok-mahasiswa-papua-dan-ambon-nyaris-bentrok-di-sleman>.

- Permenristekdikti 2018 No. 55, Pembinaan Ideologi Pancasila dalam Kegiatan Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi
- Prasetya, Beny. (2017). *Selendang Sutera Satukan Mahasiswa di Jogja*. Diakses pada 19 April 2020 dari <https://www.solopos.com/selendang-sutera-satukan-mahasiswa-di-jogja-870883>
- Totok, Tolak. (2018). Aktualisasi Nilai-nilai Kearifan Lokal dalam PKn Sebagai Peneguh Karakter Kebangsaan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 1-20. doi: <http://dx.doi.org/10.20527>
- Undang-Undang Republik Indonesia 2012 No. 12, Pendidikan Tinggi.
- Wardhani, Primandha Sukma Nur. (2018). Pelaksanaan Pendidikan Multikultural Dalam Upaya Membangun Keberagaman dan Meningkatkan Persatuan Bangsa di Sekolah Inklusi. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, (8)1, 1-12. doi: <http://dx.doi.org/10.20527>